

SINERGI EKONOMI BIRU DAN PERENCANAAN KOTA PESISIR: STRATEGI PENINGKATAN EKONOMI DAERAH BERBASIS KELAUTAN

SYNERGY OF BLUE ECONOMY AND COASTAL CITY PLANNING: A STRATEGY FOR STRENGTHENING MARINE-BASED REGIONAL ECONOMY

Muhammad Adhim Halim ^{1a}, Yan Radhinal ^{2a}, Rasdiana A ^{3a}, Hadi Abdurrahman ^{4a}

^aUniversitas Tadulako; Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Kota Palu; muhammadadhimhalim@untad.ac.id

Info Artikel:

- Artikel Masuk: 08/07/2026
- Artikel diterima: 25/07/2026
- Tersedia Online: 31/07/2026

ABSTRAK

Wilayah pesisir Indonesia menyimpan potensi ekonomi kelautan, namun pemanfaatannya belum optimal dan tidak terintegrasi dengan sistem perencanaan wilayah dan kota. Penelitian ini bertujuan mengkaji sinergi antara konsep ekonomi biru (blue economy) dan perencanaan kota pesisir sebagai strategi peningkatan ekonomi daerah berbasis kelautan. Metode yang digunakan adalah kajian literatur semi sistematis terhadap 22 pustaka inti berupa artikel jurnal terindeks, dokumen kebijakan, dan peraturan perundang-undangan terbitan tahun 2021 sampai 2025, dengan pengecualian bagi rujukan konseptual dasar, yang dianalisis secara tematik. Hasil kajian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, ekonomi biru menjadi motor penggerak ekonomi daerah pesisir melalui perikanan berkelanjutan, akuakultur, pariwisata bahari, dan energi laut terbarukan, meskipun literatur memperingatkan risiko ketidakadilan distribusi manfaat. Kedua, integrasi ekonomi biru ke dalam instrumen perencanaan ruang, khususnya tata ruang wilayah pesisir dan perencanaan ruang laut, menjadi prasyarat agar pertumbuhan ekonomi kelautan tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang dan degradasi ekosistem. Ketiga, penguatan ekonomi daerah berbasis kelautan memerlukan strategi pendukung berupa hilirisasi produk kelautan, pemberdayaan UMKM pesisir, inovasi pembiayaan biru, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini menghasilkan kerangka konseptual sinergi tiga pilar dan merekomendasikan langkah kebijakan operasional bagi pemerintah daerah pesisir, termasuk pengintegrasian muatan ekonomi biru dalam rencana tata ruang serta pembentukan forum koordinasi lintas sektor kelautan daerah.

Kata Kunci: Ekonomi Biru, Perencanaan Kota Pesisir, Ekonomi Daerah, Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi Kelautan

ABSTRACT

Indonesia's coastal areas hold enormous marine economic potential, yet its utilization remains suboptimal and often disconnected from urban and regional planning systems. This study examines the synergy between the blue economy concept and coastal city planning as a strategy to strengthen marine-based regional economies. The method is a semi-systematic literature review of 22 core references consisting of indexed journal articles, policy documents, and regulations published between 2021 and 2025, with exceptions for foundational conceptual references, analyzed thematically. The review reveals three main findings. First, the blue economy drives coastal regional economies through sustainable fisheries, aquaculture, marine tourism, and ocean renewable energy, although the literature warns of unequal distribution of benefits. Second, integrating the blue economy into spatial planning instruments, particularly coastal spatial planning and marine spatial planning, is a prerequisite to prevent spatial use conflicts and ecosystem degradation. Third, strengthening marine-based regional economies requires downstream processing of marine products, empowerment of coastal MSMEs, blue financing innovation, and multi-stakeholder collaboration. This study produces a conceptual framework of three-pillar synergy and recommends operational policy measures for coastal local governments, including the incorporation of blue economy content into spatial plans, stronger institutional integration, and the establishment of a regional cross-sectoral marine coordination forum.

Keyword: Blue Economy, Coastal City Planning, Regional Economy, Sustainable Development, Marine Economy

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai yang membentang lebih dari 108.000 kilometer, Indonesia memiliki modal geografis yang luar biasa untuk membangun perekonomian berbasis kelautan. Sebagian besar kabupaten dan kota di Indonesia merupakan wilayah pesisir, dan kawasan pesisir menjadi ruang hidup bagi puluhan juta penduduk yang menggantungkan penghidupannya pada sumber daya laut. Namun demikian, kontribusi sektor kelautan terhadap perekonomian nasional maupun daerah dinilai masih jauh di bawah potensinya (Hastuti, Muhidu, Rastin, & Mokodompit, 2023). Pemanfaatan sumber daya kelautan yang bersifat ekstraktif, tidak terencana, dan cenderung mengabaikan daya dukung lingkungan justru menimbulkan persoalan baru berupa degradasi ekosistem pesisir, penurunan stok ikan, abrasi, serta kerentanan masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim.

Sebagai verifikasi konteks geografis, Badan Informasi Geospasial mencatat 17.380 pulau yang telah memiliki nama dan koordinat pada tahun 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025 juga menggunakan angka luas perairan sekitar 6,4 juta kilometer persegi dan panjang garis pantai sekitar 108.000 kilometer. Jumlah pulau dapat berubah mengikuti verifikasi, dinamika geografis, serta pemutakhiran unsur rupabumi, sehingga penggunaan sumber resmi dan tahun rujukan perlu dinyatakan secara jelas (Badan Informasi Geospasial, 2024; Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2025).

Dalam konteks tersebut, konsep ekonomi biru (*blue economy*) hadir sebagai paradigma pembangunan yang berupaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya laut dengan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan sosial masyarakat pesisir. Konsep yang dipopulerkan oleh (Pauli, 2010) ini kemudian berkembang menjadi agenda kebijakan global, meskipun pemaknaannya tidak tunggal. (Voyer, Quirk, McIlgorm, & Azmi, 2018) menunjukkan bahwa terdapat beragam interpretasi yang saling bersaing atas konsep ekonomi biru, mulai dari laut sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, laut sebagai modal alam yang harus dilindungi, hingga laut sebagai basis penghidupan masyarakat kecil, dan perbedaan interpretasi ini berkonsekuensi langsung pada arah tata kelola kelautan yang dipilih. Ekonomi biru dalam pengertian yang berkelanjutan tidak sekadar menekankan eksploitasi sumber daya laut, melainkan mendorong penciptaan nilai tambah, efisiensi sumber daya, inklusi sosial, dan pemulihan ekosistem sebagai satu kesatuan (Cisneros-Montemayor et al., 2021). Di Indonesia, komitmen terhadap ekonomi biru telah dituangkan dalam berbagai dokumen kebijakan, termasuk Indonesia Blue Economy Roadmap yang disusun oleh (Kementerian PPN/Bappenas, 2024), yang memposisikan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus instrumen transformasi ekonomi nasional.

Peta jalan tersebut telah diperbarui melalui Indonesia Blue Economy Roadmap edisi kedua pada tahun 2024. Pembaruan ini tetap menggunakan horizon 2023 sampai 2045 dan menegaskan perlunya konsolidasi kebijakan, program, pembiayaan, serta keterlibatan pemangku kepentingan untuk menjaga kesehatan ekosistem laut sekaligus memperluas manfaat ekonomi dan sosialnya (Kementerian PPN/Bappenas, 2024).

Dari perspektif ilmu perencanaan wilayah dan kota, gagasan ekonomi daerah berbasis kelautan dapat dipahami melalui teori basis ekonomi wilayah, yang menyatakan bahwa pertumbuhan suatu daerah digerakkan oleh sektor basis yang berorientasi ke luar wilayah dan bertumpu pada keunggulan komparatif lokal. Bagi kota dan kabupaten pesisir, sumber daya kelautan merupakan keunggulan komparatif yang paling nyata, sehingga sektor ekonomi biru berpotensi menjadi sektor basis yang menggerakkan sektor non basis lainnya melalui keterkaitan ke depan dan ke belakang. Namun, agar potensi tersebut terwujud, aktivitas ekonomi kelautan memerlukan alokasi ruang yang tepat, dan di sinilah perencanaan wilayah dan kota memainkan peran sentral.

Pada saat yang sama, kota-kota pesisir menghadapi tekanan pembangunan yang semakin kompleks. Urbanisasi kawasan pesisir, ekspansi pelabuhan dan infrastruktur, reklamasi, serta pertumbuhan pariwisata bahari berlangsung cepat dan sering kali tidak diimbangi dengan perencanaan ruang yang memadai. Ketidadaan kerangka perencanaan ruang laut dan pesisir yang sistematis terbukti menimbulkan tata kelola

yang terfragmentasi, konflik pemanfaatan ruang antar sektor, serta dominasi kepentingan ekonomi atas tujuan ekologis dan sosial (Wuwung et al., 2022). Oleh karena itu, perencanaan kota pesisir yang terintegrasi dengan perencanaan ruang laut menjadi instrumen kunci untuk memastikan agenda ekonomi biru dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji kedua tema ini secara terpisah. Cisneros-Montemayor et al. (2021) mengidentifikasi kondisi pemungkin bagi ekonomi biru yang berkeadilan dan berkelanjutan pada level global. (Evans, Buchan, Fortnam, Honig, & Heaps, 2023) menegaskan pentingnya menempatkan komunitas pesisir sebagai pusat pembangunan ekonomi biru agar manfaatnya tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha skala besar, sementara (Bennett, Blythe, White, & Campero, 2021) memperingatkan sepuluh risiko ketidakadilan dalam pertumbuhan ekonomi kelautan. Di sisi perencanaan, (Pournara & Sakellariadou, 2022) mengembangkan protokol ekonomi biru berkelanjutan di zona pesisir melalui pendekatan pengelolaan wilayah pesisir terpadu, dan (Wuwung et al., 2022) menyoroti kerangka kebijakan ekonomi biru pada level nasional. Dalam konteks Indonesia, kajian (Donesia, Widodo, Saragih, & Widodo, 2023) membahas penerapan konsep ekonomi biru dalam pengembangan wilayah pesisir dan wisata bahari, dan (Irhamni & Astuti, 2024) menganalisis efisiensi pariwisata pesisir sebagai bentuk penerapan ekonomi biru spasial di Jepara.

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian yang nyata. Sebagian besar kajian ekonomi biru berfokus pada dimensi sektoral, seperti perikanan atau pariwisata, dan belum banyak yang secara eksplisit menghubungkan agenda ekonomi biru dengan instrumen perencanaan wilayah dan kota sebagai satu kerangka strategi pengembangan ekonomi daerah. Padahal, tanpa integrasi ke dalam sistem perencanaan ruang, inisiatif ekonomi biru berisiko berhenti pada tataran wacana kebijakan atau justru memicu konflik ruang di kawasan pesisir. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mensintesis dua arus literatur tersebut, yaitu literatur ekonomi biru dan literatur perencanaan kota pesisir, ke dalam satu kerangka strategi peningkatan ekonomi daerah berbasis kelautan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dipandu oleh tiga pertanyaan penelitian: (1) bagaimana kontribusi ekonomi biru terhadap perekonomian daerah pesisir menurut literatur mutakhir; (2) bagaimana bentuk integrasi ekonomi biru ke dalam perencanaan kota dan ruang pesisir; dan (3) strategi apa yang diperlukan serta tantangan apa yang dihadapi dalam penguatan ekonomi daerah berbasis kelautan. Tujuan penelitian ini adalah menjawab ketiga pertanyaan tersebut dan merumuskannya ke dalam sebuah kerangka konseptual sinergi yang dapat menjadi rujukan perencanaan pembangunan daerah pesisir.

2. DATA DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur semi sistematis (semi-systematic literature review) dengan analisis kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji bersifat lintas disiplin, mencakup bidang ekonomi kelautan, perencanaan wilayah dan kota, serta kebijakan publik, sehingga memerlukan sintesis dari beragam jenis literatur yang tidak selalu dapat ditangkap oleh protokol tinjauan sistematis penuh. Sumber data terdiri dari artikel jurnal ilmiah terindeks internasional dan nasional, dokumen kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan, serta laporan lembaga resmi yang relevan.

Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data Scopus, Google Scholar, dan portal jurnal nasional dengan menggunakan kombinasi kata kunci: blue economy, marine spatial planning, coastal city planning, ekonomi biru, perencanaan wilayah pesisir, ekonomi kelautan, dan ekonomi daerah. Proses seleksi dilakukan secara bertahap, dimulai dari identifikasi pustaka melalui penelusuran kata kunci, penyaringan berdasarkan judul dan abstrak, hingga penilaian kelayakan teks penuh. Hasil penelusuran disaring berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi sebagaimana dirangkum pada Tabel 1, sehingga diperoleh 22 pustaka inti yang terdiri dari 18 artikel dan laporan ilmiah serta 4 dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Untuk meningkatkan keterulangan, pencarian menggunakan dua rumpun istilah dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dengan kombinasi Boolean: ("blue economy" OR "ekonomi biru") AND ("marine spatial planning" OR "coastal city planning" OR "perencanaan wilayah pesisir") AND ("regional economy" OR "ekonomi daerah"). Duplikasi dikenali berdasarkan kesamaan DOI, judul, dan nama penulis. Alasan eksklusi dicatat dalam lembar penelusuran, terutama karena tidak sesuai dengan konteks wilayah pesisir, tidak menjawab pertanyaan penelitian, berupa artikel opini tanpa dasar empiris, teks penuh tidak tersedia, atau merupakan publikasi yang sama. Karena penelitian ini menggunakan desain semi-sistematis dan bukan tinjauan sistematis penuh berbasis PRISMA, pencarian diarahkan pada keterwakilan arus literatur utama dan keterlacakan proses analisis, bukan pada klaim bahwa seluruh publikasi yang tersedia telah terinventarisasi.

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi Literatur

Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
Terbit tahun 2021-2025, dengan pengecualian rujukan konseptual dasar yang menjadi fondasi teori	Terbit di luar rentang waktu tanpa nilai konseptual mendasar
Relevan langsung dengan ekonomi biru, perencanaan pesisir, atau ekonomi daerah	Tidak relevan dengan konteks pembangunan wilayah dan kota pesisir
Melalui penelaahan sejawat atau diterbitkan lembaga resmi yang kredibel	Artikel opini tanpa dasar empiris atau sumber yang tidak dapat diverifikasi

Tabel 1a. Protokol Ekstraksi, Pengodean, dan Penetapan Tema

Tahap	Prosedur	Keluaran
Ekstraksi data	Mencatat penulis, tahun, wilayah kajian, jenis sumber, metode, temuan utama, serta implikasi bagi perencanaan wilayah pesisir.	Lembar ekstraksi setiap pustaka.
Pengodean deduktif	Menetapkan kode awal berdasarkan tiga pertanyaan penelitian: kontribusi ekonomi, integrasi ruang, serta strategi dan tantangan implementasi.	Tiga kelompok kode utama.
Pengodean induktif	Menambahkan subkode yang berulang dalam pustaka, seperti keadilan biru, konflik ruang, hilirisasi, UMKM pesisir, pembiayaan, dan koordinasi kelembagaan.	Subtema empiris dan kebijakan.
Validasi tema	Membandingkan artikel ilmiah, dokumen kebijakan, dan regulasi. Tema dipertahankan apabila didukung oleh sedikitnya tiga sumber independen atau memperoleh dukungan silang antara literatur ilmiah dan dokumen resmi.	Tema yang memiliki dukungan lintas sumber.
Sintesis naratif	Menggabungkan persamaan, perbedaan, batas konteks, dan implikasi perencanaan tanpa	Tiga tema utama hasil kajian.

Tahap	Prosedur	Keluaran
	menghilangkan perdebatan antara orientasi pertumbuhan dan keadilan.	

Pengodean dilakukan dengan pendekatan gabungan deduktif dan induktif. Kode deduktif dibangun dari pertanyaan penelitian, sedangkan subkode induktif dikembangkan dari pola yang berulang dalam pustaka. Setiap pustaka dapat memiliki lebih dari satu kode. Perbedaan temuan antar sumber tetap dipertahankan dalam sintesis, khususnya pada isu pertumbuhan ekonomi kelautan, keadilan distribusi manfaat, perlindungan ruang hidup masyarakat pesisir, dan risiko degradasi ekosistem. Matriks pengodean lengkap terhadap 22 pustaka inti disajikan pada Lampiran 1.

Pustaka yang lolos penyaringan dianalisis menggunakan analisis tematik melalui tahap reduksi data, pengodean tema, dan penyusunan sintesis naratif. Tiga tema utama yang dihasilkan adalah: kontribusi ekonomi biru terhadap ekonomi daerah pesisir, integrasi ekonomi biru dalam perencanaan kota dan ruang pesisir, serta strategi dan tantangan penguatan ekonomi daerah berbasis kelautan. Validitas kajian dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan temuan dari artikel ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan lembaga resmi.

Di luar 22 pustaka inti, tiga sumber resmi tambahan digunakan untuk memutakhirkan konteks geografis dan kebijakan, yaitu data jumlah pulau dari Badan Informasi Geospasial, informasi luas perairan dan garis pantai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Indonesia Blue Economy Roadmap edisi kedua dari Kementerian PPN/Bappenas. Ketiga sumber tambahan tersebut berfungsi sebagai verifikasi konteks dan tidak dimasukkan ke dalam korpus pengodean tematik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, sebagai kajian literatur, penelitian ini tidak menggunakan data primer sehingga temuannya bersifat konseptual dan memerlukan verifikasi empiris lanjutan. Kedua, terdapat potensi bias seleksi karena penelusuran bertumpu pada basis data dan kata kunci tertentu, sehingga literatur relevan yang menggunakan istilah berbeda mungkin tidak tertangkap. Ketiga, keragaman konteks geografis dari literatur yang dikaji menuntut kehati-hatian dalam menggeneralisasi temuan ke seluruh daerah pesisir Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis tematik terhadap literatur yang dikaji, ditemukan bahwa sinergi antara ekonomi biru dan perencanaan kota pesisir merupakan kunci bagi peningkatan ekonomi daerah berbasis kelautan yang berkelanjutan. Ringkasan literatur utama yang menjadi basis sintesis disajikan pada Tabel 2, sedangkan pembahasan berikut menguraikan tiga tema utama yang dihasilkan dari kajian ini.

Tabel 2. Sintesis Literatur Utama

Penulis (Tahun)	Fokus Kajian	Temuan Kunci
Cisneros-Montemayor et al. (2021)	Kondisi pemungkin ekonomi biru global	Keberlanjutan dan keadilan ekonomi biru harus dibangun melalui

Penulis (Tahun)	Fokus Kajian	Temuan Kunci
		kebijakan, bukan hasil otomatis pertumbuhan sektor kelautan
Bennett et al. (2021)	Kritik <i>blue growth</i> dan <i>blue justice</i>	Terdapat sepuluh risiko ketidakadilan sosial dalam ekonomi kelautan, termasuk perampasan ruang laut dan marginalisasi nelayan kecil
Evans et al. (2023)	Posisi komunitas pesisir dalam ekonomi biru	Strategi ekonomi biru yang berpusat pada komunitas lebih menjamin keberlanjutan sosial dan ekologis jangka panjang
Wuwung et al. (2022)	Tata kelola ekonomi biru nasional	Ekonomi biru tanpa kerangka perencanaan ruang laut menghasilkan tata kelola terfragmentasi dan konflik pemanfaatan ruang
Pournara & Sakellariadou (2022)	Protokol ekonomi biru di zona pesisir	Pengelolaan pesisir terpadu dan analisis jasa ekosistem menjadi dasar penentuan intensitas kegiatan ekonomi pesisir
Ujianti et al. (2024)	Ekonomi biru berbasis perikanan pantura Jawa	Produksi perikanan tangkap dan budidaya berkontribusi pada PDRB dan penyerapan tenaga kerja daerah pesisir
Irhamni & Astuti (2024)	Ekonomi biru spasial pariwisata Jepara	Penerapan prinsip ekonomi biru secara spasial meningkatkan efisiensi destinasi wisata pesisir
Kobayashi (2023)	Perikanan dan akuakultur berkelanjutan di Ambon	Kebijakan pemungkin dan inovasi lokal menentukan keberhasilan ekonomi biru pada kota pesisir kawasan timur Indonesia

Ekonomi Biru sebagai Motor Penggerak Ekonomi Daerah Pesisir

Temuan pertama dari kajian ini menegaskan bahwa ekonomi biru memiliki kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah pesisir melalui beragam sektor unggulan. (Kementerian PPN/Bappenas, 2023) mengidentifikasi sektor ekonomi biru Indonesia yang telah mapan meliputi perikanan tangkap, pengolahan hasil laut, pelayaran dan kepelabuhanan, industri galangan kapal, serta pariwisata pesisir, sementara subsektor yang sedang berkembang mencakup akuakultur laut, energi terbarukan lepas pantai, dan bioteknologi kelautan. Keragaman sektor ini menunjukkan bahwa ekonomi biru bukan konsep tunggal,

melainkan portofolio aktivitas ekonomi yang dapat disesuaikan dengan karakteristik dan keunggulan komparatif masing-masing daerah, sejalan dengan logika teori basis ekonomi wilayah.

Pada level daerah, bukti empiris menunjukkan keterkaitan erat antara aktivitas ekonomi kelautan dan kinerja perekonomian regional. Studi (Ujianti, Burhanuddin, & Novita, 2024) terhadap tiga kabupaten dan kota pesisir di pantai utara Jawa Tengah, yaitu Kota Semarang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Kendal, menemukan bahwa produksi perikanan tangkap dan budidaya berkontribusi terhadap pembentukan produk domestik regional bruto serta penyerapan tenaga kerja di wilayah pesisir. Temuan serupa dikemukakan oleh (Hastuti et al., 2023) yang menegaskan besarnya potensi ekonomi maritim Indonesia sebagai negara kepulauan, mulai dari perikanan, energi, hingga jasa maritim. Pada konteks kawasan timur Indonesia, (Kobayashi, 2023) menunjukkan bahwa pengembangan perikanan dan akuakultur berkelanjutan di Kota Ambon sangat ditentukan oleh kebijakan pemungkin dan inovasi kelembagaan lokal, sementara (Nurqalbi, 2024) menemukan bahwa penerapan ekonomi biru menjadi pilar pembangunan sosial ekonomi di Kabupaten Bulukumba melalui perikanan dan wisata bahari yang dikelola masyarakat.

Sektor pariwisata bahari juga menunjukkan peran yang semakin signifikan. (Irhamni & Astuti, 2024) melalui analisis efisiensi pariwisata pesisir di Kabupaten Jepara menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi biru secara spasial mampu meningkatkan kinerja destinasi wisata pesisir sekaligus menjaga kualitas lingkungan sebagai aset utama pariwisata. Studi (Donesia et al., 2023) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa pengembangan wisata bahari berbasis ekonomi biru dapat menggerakkan ekonomi lokal melalui efek pengganda terhadap usaha akomodasi, kuliner, transportasi, dan jasa pendukung lainnya. Lebih jauh, model pariwisata berbasis masyarakat terbukti menjadi jalur yang menghubungkan ekonomi biru dengan kesejahteraan lokal; (Sumarmi, Kurniawati, & Aliman, 2020) mendokumentasikan bagaimana pengembangan wisata perikanan berbasis komunitas di Pantai Klatak, Tulungagung, mampu membangun ekonomi biru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Meskipun demikian, literatur tidak sepenuhnya seragam dalam menilai dampak ekonomi biru, dan perdebatan ini penting untuk diangkat. Kubu yang menekankan *blue growth* memandang laut sebagai perbatasan ekonomi baru yang harus segera dikapitalisasi, sedangkan kubu *blue justice* mengingatkan bahwa pertumbuhan tersebut dapat menghasilkan ketidakadilan baru. (Bennett et al., 2021) mengidentifikasi sepuluh risiko ketidakadilan dalam ekonomi kelautan, antara lain perampasan ruang laut, pengusuran masyarakat pesisir, dan marginalisasi nelayan skala kecil oleh industri besar. (Evans et al., 2023) menegaskan risiko serupa, bahwa pembangunan ekonomi biru yang berorientasi pertumbuhan semata dapat meminggirkan komunitas pesisir, misalnya melalui privatisasi ruang laut dan persaingan yang timpang. (Cisneros-Montemayor et al., 2021) menengahi perdebatan ini dengan menunjukkan bahwa keberlanjutan dan keadilan merupakan kondisi pemungkin yang harus dibangun secara sengaja melalui kebijakan. Bagi konteks perencanaan daerah, implikasinya jelas: kontribusi ekonomi biru terhadap ekonomi daerah akan optimal apabila diarahkan oleh kerangka kebijakan dan perencanaan ruang yang secara eksplisit memastikan distribusi manfaat bagi masyarakat pesisir, bukan sekadar mengejar pertumbuhan sektor.

Integrasi Ekonomi Biru dalam Perencanaan Kota dan Ruang Pesisir

Temuan kedua menunjukkan bahwa perencanaan wilayah dan kota merupakan wahana utama untuk mengoperasionalkan ekonomi biru di tingkat daerah. Kota pesisir memiliki karakteristik unik karena berada pada pertemuan antara sistem daratan dan sistem laut, sehingga perencanaannya tidak dapat mengandalkan pendekatan perencanaan kota konvensional yang berorientasi daratan semata. (Wuwung et al., 2022) menegaskan bahwa pengembangan ekonomi biru tanpa dukungan kerangka perencanaan ruang laut yang sistematis cenderung menghasilkan tata kelola yang terfragmentasi, konflik pemanfaatan ruang yang semakin intensif, serta dominasi kepentingan ekonomi atas tujuan ekologis dan sosial.

Dalam konteks ini, perencanaan ruang laut (*marine spatial planning*) dan pengelolaan wilayah pesisir terpadu (*integrated coastal zone management*) menjadi dua instrumen yang paling banyak dirujuk dalam literatur. (Pournara & Sakellariadou, 2022) mengembangkan protokol ekonomi biru berkelanjutan di zona pesisir yang menggabungkan pengelolaan pesisir terpadu dengan analisis jasa ekosistem, sehingga kapasitas dan batas daya dukung ekosistem pesisir menjadi dasar dalam menentukan intensitas kegiatan ekonomi yang diperbolehkan. Pendekatan semacam ini sangat relevan bagi kota-kota pesisir Indonesia yang menghadapi tekanan pembangunan tinggi, karena memberikan basis ilmiah bagi alokasi ruang antara kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan pelabuhan, dan kawasan wisata.

Kerangka regulasi di Indonesia sesungguhnya telah menyediakan landasan bagi integrasi tersebut. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur perencanaan tata ruang wilayah termasuk kawasan perkotaan (Republik Indonesia, 2007a); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil beserta perubahannya mengatur perencanaan zonasi wilayah pesisir (Republik Indonesia, 2007b); dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan memberikan payung bagi pembangunan kelautan nasional termasuk pengembangan ekonomi kelautan (Republik Indonesia, 2014). Integrasi rencana zonasi wilayah pesisir ke dalam rencana tata ruang wilayah melalui kebijakan satu peta ruang darat dan laut merupakan langkah maju, namun implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi kendala teknis dan kelembagaan. (Donesia et al., 2023) menggarisbawahi bahwa tata kelola dan valuasi ekonomi sumber daya pesisir merupakan prasyarat agar perencanaan ruang dapat mengalokasikan sumber daya kelautan secara efisien sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Lebih jauh, integrasi ekonomi biru dalam perencanaan kota pesisir juga berarti menata ulang orientasi pembangunan kota. Kota pesisir yang mengadopsi ekonomi biru perlu mengarahkan infrastruktur perkotaan untuk mendukung rantai nilai kelautan, misalnya melalui pengembangan kawasan minapolitan, sentra pengolahan hasil laut, pelabuhan perikanan yang terhubung dengan sistem logistik kota, serta kawasan tepi air yang memadukan fungsi ekonomi, rekreasi, dan perlindungan pantai. Pada saat yang sama, perencanaan kota pesisir harus mengakomodasi infrastruktur hijau dan biru, seperti rehabilitasi mangrove dan perlindungan terumbu karang, yang berfungsi ganda sebagai penopang ekonomi perikanan dan pariwisata sekaligus benteng alami terhadap abrasi dan banjir rob. Dengan demikian, perencanaan ruang menjadi jembatan yang menghubungkan agenda ekonomi biru dengan ketahanan iklim kawasan pesisir.

Strategi dan Tantangan Penguatan Ekonomi Daerah Berbasis Kelautan

Temuan ketiga dari kajian ini merumuskan strategi penguatan ekonomi daerah berbasis kelautan sekaligus mengidentifikasi tantangan implementasinya. Strategi pertama adalah hilirisasi dan penciptaan nilai tambah produk kelautan. Selama ini sebagian besar hasil laut daerah dijual dalam bentuk mentah sehingga nilai tambah ekonominya dinikmati di luar daerah penghasil. Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan skala kecil dan menengah di kota pesisir dapat meningkatkan pendapatan daerah, menyerap tenaga kerja lokal, dan memperkuat keterkaitan antar sektor dalam perekonomian regional (Hastuti et al., 2023).

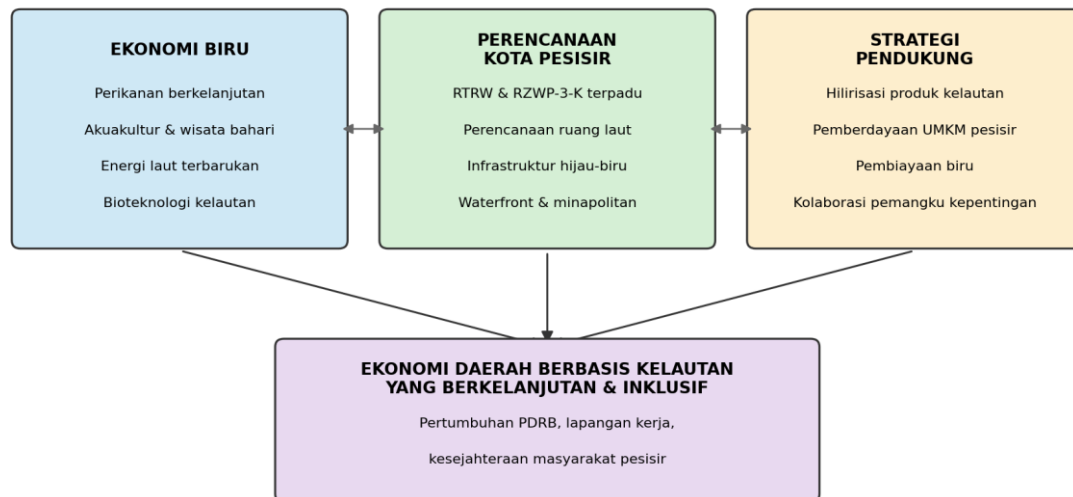
Strategi kedua adalah pemberdayaan UMKM pesisir sebagai tulang punggung ekonomi kelautan rakyat. (Khoiriyah, 2024) menunjukkan bahwa implementasi ekonomi biru di Indonesia sangat bergantung pada kesiapan pelaku usaha lokal, termasuk nelayan kecil, pembudidaya, dan pelaku usaha pengolahan skala mikro. Penguatan kapasitas UMKM pesisir melalui pelatihan, akses permodalan, sertifikasi produk, dan digitalisasi pemasaran menjadi kunci agar manfaat ekonomi biru tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha besar. Temuan (Evans et al., 2023) dan pengalaman pariwisata berbasis komunitas yang didokumentasikan (Sumarmi et al., 2020) memperkuat argumen bahwa strategi ekonomi biru yang berpusat pada komunitas lebih mampu menjaga keberlanjutan sosial dan ekologis dalam jangka panjang.

Strategi ketiga adalah inovasi pembiayaan pembangunan kelautan. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah merupakan hambatan klasik dalam pembangunan infrastruktur pesisir. Pemerintah Indonesia telah merintis instrumen pembiayaan biru, antara lain melalui penerbitan obligasi biru yang hasilnya digunakan untuk mendanai proyek rehabilitasi mangrove, terumbu karang, dan perlindungan pesisir. (Zhang & Su, 2024) menegaskan pentingnya model pembiayaan inovatif berbasis kolaborasi sektor publik dan swasta untuk menarik investasi ke proyek berkelanjutan, sementara (Rashed & Shah, 2021) menunjukkan bahwa keterlibatan sektor swasta dalam agenda pembangunan berkelanjutan memerlukan kejelasan insentif dan kepastian regulasi dari pemerintah.

Di samping strategi tersebut, kajian ini mengidentifikasi sejumlah tantangan. Tantangan pertama adalah koordinasi kelembagaan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan. Urusan kelautan dan pesisir melibatkan banyak institusi dengan kewenangan yang tumpang tindih, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota, sehingga sinkronisasi antara rencana tata ruang, rencana zonasi, dan rencana pembangunan daerah sering kali sulit dicapai (Wuwung et al., 2022). Tantangan kedua adalah tekanan lingkungan yang terus meningkat. Kehilangan ekosistem mangrove, pencemaran pesisir, penangkapan ikan berlebihan, dan dampak perubahan iklim seperti kenaikan muka air laut mengancam basis sumber daya yang menjadi fondasi ekonomi biru itu sendiri. Tantangan ketiga adalah kesenjangan kapasitas sumber daya manusia dan data, baik dalam penyusunan rencana ruang laut yang berbasis bukti maupun dalam pengelolaan usaha kelautan yang berkelanjutan di tingkat masyarakat (Kementerian PPN/Bappenas, 2024).

Sintesis dari ketiga tema di atas dirangkum dalam kerangka konseptual pada Gambar 1. Ekonomi biru menyediakan arah dan portofolio sektor pengembangan, perencanaan kota pesisir menyediakan instrumen alokasi ruang dan pengendalian pembangunan, sedangkan strategi pendukung berupa hilirisasi, pemberdayaan UMKM, dan pembiayaan biru menyediakan mekanisme operasionalnya. Ketiga pilar tersebut

saling mempengaruhi dan secara bersama-sama bermuara pada peningkatan ekonomi daerah berbasis kelautan yang berkelanjutan dan inklusif, yang terukur melalui pertumbuhan produk domestik regional bruto, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Sinergi Ekonomi Biru dan Perencanaan Kota Pesisir

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa sinergi antara ekonomi biru dan perencanaan kota pesisir merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan ekonomi daerah berbasis kelautan. Ekonomi biru terbukti berkontribusi terhadap perekonomian daerah pesisir melalui sektor perikanan, akuakultur, pariwisata bahari, dan sektor kelautan lainnya, namun kontribusi tersebut hanya akan optimal dan inklusif apabila diarahkan oleh kerangka perencanaan ruang yang memadai serta kebijakan yang secara sengaja menjamin keadilan distribusi manfaat. Integrasi prinsip ekonomi biru ke dalam rencana tata ruang wilayah, rencana zonasi pesisir, dan perencanaan infrastruktur kota pesisir menjadi prasyarat untuk mencegah konflik pemanfaatan ruang dan degradasi ekosistem. Strategi penguatan ekonomi daerah berbasis kelautan mencakup hilirisasi produk kelautan, pemberdayaan UMKM pesisir, dan inovasi pembiayaan biru, dengan tantangan utama berupa koordinasi kelembagaan, tekanan lingkungan, dan keterbatasan kapasitas daerah.

Kesimpulan mengenai kontribusi tersebut perlu dibaca sebagai hasil sintesis atas hubungan dan dampak yang dilaporkan oleh sumber empiris yang ditelaah. Penelitian ini tidak melakukan estimasi kausal secara mandiri, sehingga besar dan arah dampak pada setiap daerah tetap dipengaruhi oleh struktur ekonomi lokal, kualitas tata kelola, daya dukung ekosistem, kapasitas kelembagaan, serta posisi masyarakat pesisir dalam proses perencanaan.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menjembatani literatur ekonomi biru dan literatur perencanaan wilayah dan kota yang selama ini berkembang secara terpisah, serta menempatkan ekonomi biru dalam kerangka teori basis ekonomi wilayah. Secara praktis, hasil kajian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan operasional bagi pemerintah daerah pesisir, yaitu: (1) memasukkan muatan ekonomi biru secara eksplisit ke dalam revisi rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang kawasan pesisir; (2) membentuk forum koordinasi lintas perangkat daerah untuk urusan kelautan dan pesisir yang menyinkronkan rencana ruang, rencana pembangunan, dan program sektoral; (3) mengembangkan

program hilirisasi dan inkubasi UMKM pesisir yang terhubung dengan kawasan minapolitan dan sentra pengolahan hasil laut; serta (4) menjajaki skema pembiayaan biru dan kemitraan pemerintah dengan badan usaha untuk pendanaan infrastruktur pesisir.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi empiris pada kota pesisir tertentu di Indonesia, misalnya dengan mengukur kontribusi sektor ekonomi biru terhadap produk domestik regional bruto melalui analisis location quotient dan shift share, serta menganalisis muatan ekonomi biru dalam dokumen rencana tata ruang daerah melalui analisis isi, sehingga temuan konseptual dalam kajian ini dapat diverifikasi dan diperkaya dengan data lapangan.

5. PERNYATAAN RESMI

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Prodi PWK Untad atas dukungan pendanaan yang memungkinkan penelitian ini terlaksana dengan baik.

6. REFERENSI

- Badan Informasi Geospasial. (2024, December). *Pulau Indonesia Bertambah Jadi 17.380, Mengapa Angkanya Berubah Setiap Tahun?* Retrieved from <https://sipulau.big.go.id/news/11>
- Bennett, N. J., Blythe, J., White, C. S., & Campero, C. (2021). Blue Growth and Blue Justice: Ten Risks and Solutions for the Ocean Economy. *Marine Policy*, 125, 104387. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104387>
- Cisneros-Montemayor, A. M., Moreno-Báez, M., Reygondeau, G., Cheung, W. W. L., Crosman, K. M., González-Espinosa, P. C., ... Ota, Y. (2021). Enabling Conditions for an Equitable and Sustainable Blue Economy. *Nature*, 591(7850), 396–401. <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03327-3>
- Donesia, E. A., Widodo, P., Saragih, R. J. H., & Widodo, S. P. (2023). Konsep Blue Economy dalam Pengembangan Wilayah Pesisir dan Wisata Bahari di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1950–1959. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5548>
- Evans, L. S., Buchan, P. M., Fortnam, M., Honig, M., & Heaps, L. (2023). Putting Coastal Communities at the Center of a Sustainable Blue Economy: A Review of Risks, Opportunities, and Strategies. *Frontiers in Political Science*, 4, 1032204. <https://doi.org/10.3389/fpos.2022.1032204>
- Hastuti, Muhidu, A., Rastin, & Mokodompit, E. A. (2023). Indonesia's Marine Economic Potential as a Maritime Country. *International Journal of Science, Technology & Management*, 4(4), 813–825. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v4i4.897>
- Irhamni, M. R., & Astuti, W. B. (2024). Spatial Blue Economy: Coastal Tourism Efficiency as an Application of Blue Economy in Jepara Region, Central Java, Indonesia. *Economic and Social of Fisheries and Marine Journal*, 12(1), 29–43. <https://doi.org/10.21776/ub.ecsofim.2024.012.01.03>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2025, November). *Pangan Biru Solusi Penuhi Gizi Masyarakat Menuju Indonesia Emas*. Retrieved from <https://kkp.go.id/news/news-detail/pangan-biru-solusi-penuhi-gizi-masyarakat-menuju-indonesia-emas-Og1Q.html>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2023). *Indonesia Blue Economy Roadmap*. Jakarta. Retrieved from https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Unit_Kerja/Dir%20Industri%2C%20Ekonomi%20dan%20Kreatif/Dummy_Indonesia%20Blue%20Economy%20Roadmap_Ebook.pdf
- Kementerian PPN/Bappenas. (2024). *Indonesia Blue Economy Roadmap: Second Edition*. Jakarta. Retrieved from https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/dokumenbappenas/konten/Upload%20Terbaru/EBOOK%20ENG%2017102024_Indonesia%20Blue%20Economy%20Roadmap-2nd%20Edition.pdf

Halim, M. A., et. al. (2026). Sinergi Ekonomi Biru dan Perencanaan Kota Pesisir Strategi Peningkatan Ekonomi Daerah Berbasis Kelautan. *Zoning: Journal of Urban and Regional Planning*, 3(1), 01-14
Doi: <https://doi.org/10.33019/wp83er49>

- Khoiriyah, A. Z. (2024). Implementasi Ekonomi Biru di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 1331–1356. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4161>
- Kobayashi, M. (2023). Promoting Sustainable Fisheries and Aquaculture: Enabling Policies, Innovation and Challenges for Achieving Sustainable Blue Economies in Ambon, Maluku Province, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1207(1), 12006. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1207/1/012006>
- Nurqalbi, A. (2024). Economy Blue sebagai Pilar Pembangunan Sosial Ekonomi di Kabupaten Bulukumba. *Journal of Community Development*, 3(3), 46–56.
- Pauli, G. (2010). *The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs*. Paradigm Publications.
- Pournara, A., & Sakellariadou, F. (2022). Development of a Protocol for a Sustainable Blue Economy in the Coastal Zone: Case Study and Preliminary Results in a Coastal Industrial Area in the Eastern Mediterranean. *Sustainability*, 14(16), 10323. <https://doi.org/10.3390/su141610323>
- Rashed, A. H., & Shah, A. (2021). The role of private sector in the implementation of sustainable development goals. *Environment, Development and Sustainability*, 23(3), 2931–2948. <https://doi.org/10.1007/s10668-020-00718-w>
- Republik Indonesia. (2007a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*.
- Republik Indonesia. (2007b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan*.
- Sumarmi, Kurniawati, E., & Aliman, M. (2020). Community Based Tourism (CBT) to Establish Blue Economy and Improve Public Welfare for Fishing Tourism Development in Klatak Beach, Tulungagung, Indonesia. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 31(3), 979–986. <https://doi.org/10.30892/gtg.31307-530>
- Ujianti, R. M. D., Burhanuddin, A., & Novita, M. (2024). Blue Economic Analysis in Coastal Areas of the Indonesian Java Sea Based on Fisheries. *Advances in Agriculture*, 2024, 5550622. <https://doi.org/10.1155/2024/5550622>
- Voyer, M., Quirk, G., McIlgorm, A., & Azmi, K. (2018). Shades of Blue: What Do Competing Interpretations of the Blue Economy Mean for Oceans Governance? *Journal of Environmental Policy & Planning*, 20(5), 595–616. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2018.1473153>
- Wuwung, L., Croft, F., Benzaken, D., Azmi, K., Goodman, C., Rambourg, C., & Voyer, M. (2022). Global Blue Economy Governance: A Methodological Approach to Investigating Blue Economy Implementation. *Frontiers in Marine Science*, 9, 1043881. <https://doi.org/10.3389/fmars.2022.1043881>
- Zhang, Y., & Su, Y. (2024). Towards a Sustainable Future: Exploring Innovative Financing Models for Renewable Energy. *MEDAAD*, 2024, 34–40. <https://doi.org/10.70470/MEDAAD/2024/006>

LAMPIRAN 1. MATRIKS PENGODEAN 22 PUSTAKA INTI

No.	Sumber	Kode tema	Peran dalam sintesis
1	Bennett et al. (2021)	Keadilan biru; risiko sosial	Mengidentifikasi risiko marginalisasi, perampasan ruang laut, dan ketimpangan manfaat.
2	Cisneros-Montemayor et al. (2021)	Kondisi pemungkin; tata kelola	Menjelaskan syarat kebijakan untuk ekonomi biru yang berkeadilan dan berkelanjutan.
3	Donesia et al. (2023)	Wisata bahari; pengembangan pesisir	Memberikan konteks Indonesia mengenai penerapan ekonomi biru pada wilayah pesisir dan pariwisata.
4	Evans et al. (2023)	Komunitas pesisir; inklusi	Menegaskan perlunya menempatkan komunitas pesisir sebagai pusat strategi ekonomi biru.
5	Hastuti et al. (2023)	Potensi ekonomi kelautan	Memberikan gambaran portofolio potensi ekonomi kelautan Indonesia.
6	Irhamni dan Astuti (2024)	Ekonomi biru spasial; pariwisata	Mendukung hubungan antara prinsip ekonomi biru, efisiensi destinasi, dan pengaturan ruang pesisir.
7	Kementerian PPN/Bappenas (2023)	Kebijakan nasional; sektor prioritas	Menjadi acuan arah, sektor, dan tahapan transformasi ekonomi biru Indonesia.
8	Khoiriyah (2024)	Implementasi; pelaku lokal	Mendukung pembahasan kesiapan pelaku usaha dan tantangan implementasi ekonomi biru.
9	Kobayashi (2023)	Perikanan; akuakultur; inovasi lokal	Memberikan contoh kota pesisir Indonesia timur dan pentingnya kebijakan pemungkin.
10	Nurqalbi (2024)	Ekonomi lokal; Bulukumba	Memberikan bukti kontekstual mengenai ekonomi biru dan pembangunan sosial ekonomi daerah pesisir.
11	Pauli (2010)	Fondasi konseptual	Digunakan sebagai rujukan awal perkembangan konsep ekonomi biru.
12	Pournara dan Sakellariadou (2022)	Pengelolaan pesisir terpadu; jasa ekosistem	Mendukung integrasi ekonomi biru melalui perencanaan dan pengelolaan zona pesisir.
13	Rashed dan Shah (2021)	Kemitraan swasta; SDGs	Mendukung peran sektor swasta dan kemitraan dalam pembiayaan serta pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

No.	Sumber	Kode tema	Peran dalam sintesis
14	Sarangi (2023)	Valuasi ekonomi; tata kelola pesisir	Menghubungkan penilaian sumber daya pesisir dengan tata kelola dan tujuan pembangunan berkelanjutan.
15	Sumarmi et al. (2020)	Pariwisata berbasis masyarakat	Menunjukkan hubungan ekonomi biru, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan lokal.
16	Ujianti et al. (2024)	Perikanan; ekonomi regional	Memberikan bukti hubungan kegiatan perikanan dengan PDRB dan penyerapan tenaga kerja daerah pesisir.
17	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007	Penataan ruang	Menjadi dasar integrasi kegiatan ekonomi biru ke dalam instrumen tata ruang wilayah.
18	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007	Pengelolaan pesisir dan pulau kecil	Menjadi dasar pengelolaan wilayah pesisir, sumber daya, dan pemanfaatan ruang pesisir.
19	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014	Kelautan; ruang laut	Menjadi dasar kebijakan kelautan dan keterkaitan perencanaan ruang laut.
20	Voyer et al. (2018)	Interpretasi ekonomi biru	Menjelaskan perbedaan orientasi pertumbuhan, konservasi, dan penghidupan dalam ekonomi biru.
21	Wuwung et al. (2022)	Tata kelola; fragmentasi kelembagaan	Mendukung analisis mengenai koordinasi lintas sektor dan kebutuhan kerangka perencanaan ruang.
22	Zhang dan Su (2024)	Pembiayaan inovatif	Mendukung pembahasan alternatif pembiayaan untuk investasi berkelanjutan dan infrastruktur pesisir.

Sumber: hasil pengodean dan sintesis penulis (2026)